

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nurpala^{a1*}, Arrozi^{a2}

^aProgram Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul

¹*falah.indah@student.esaunggul.ac.id**

**korespondensi penulis*

Received: 04 September 2023; Revised: 20 September 2023; Accepted: 04 Oktober 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah, sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian bendahara pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 42 SKPD. Data yang digunakan adalah data primer dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara simultan pada variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dari hasil uji simultan (Uji F), dan secara parsial menunjukkan hasil kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuktikan dari uji parsial (Uji t)

Kata kunci: *Kualitas Laporan Keuangan; Pemerintah Daerah; Kompetensi SDM; SIPD; Sistem Pengendalian Intern*

Abstract

This study aims to determine the effect of human resource competence, local government information systems, internal control systems on the quality of local government financial reports. The population in this study is the expenditure treasurer's share of the SKPD in the Provincial Government of DKI Jakarta with a total of 42 SKPD. The data used is primary data with a quantitative descriptive approach obtained from respondents through distributing questionnaires. Therefore, the data analysis used is an analysis in the form of multiple linear regression tests. The results of this study indicate that, simultaneously on the variable competence of human resources, local government information systems and internal control systems have a significant effect on the quality of local government financial reports. This is evidenced by the results of the simultaneous test (Test F). And partially shows the results of human resource competencies, local government information systems and internal control systems have a significant effect on the quality of local government financial reports as evidenced by the partial test (t test).

Keywords: *Competence of Human Resources; Internal Control Systems; Local Government Information Systems; Quality of Local Government Financial Reports*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan menjadi gambaran penting di dalam melihat posisi keuangan dan kinerja keuangan (Suryatimur et al., 2020). Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur tentang posisi dan transaksi keuangan suatu entitas (Armel et al., 2017). Pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan harus memberikan informasi yang akurat dan berguna sehingga pengguna dapat menilai transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan dalam membuat keputusan.

Laporan keuangan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah (SAP). Pemangku kepentingan akan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah untuk membuat keputusan, yang diharapkan akan menghasilkan pemerintah yang lebih baik dan inovatif. Laporan keuangan dapat dikatakan bermutu bila laporan keuangan yang disajikan mempunyai empat ciri ialah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (BPK, 2010).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah erat kaitannya dengan kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas tinggi untuk memastikan pemerintah yang baik (Ramadhani et al., 2019). Namun, permasalahan yang sering terjadi dalam instansi pemerintah daerah penataan pegawai seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan kualitas dan kuantitas. Seperti halnya yang terjadi pada beberapa SKPD/UKPD yang seringkali menempatkan pegawai tidak sesuai dengan jabatan pegawai atau tidak memiliki kompetensi dan sertifikat sebagai bendahara keuangan bahkan menempatkan pegawai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) sebagai pengelola laporan keuangan. Hal ini berkaitan dengan pengembangan organisasi yang hanya mengutamakan otoritas sementara sumber daya manusia saat ini tidak memenuhi kompetensi yang seharusnya (Iqbal, 2022).

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas (PERKA NO 7 Tahun 2013, 2013). Kompetensi ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan (Cahyandari & Triyono, 2017). Temuan ini bertentangan dengan penelitian yang menemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Sanjaya, 2017). Hasil observasi menyatakan responden tidak berpendapat tentang Pemerintah Daerah selalu melakukan evaluasi mengenai kompetensi kepegawaian.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan adanya suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan, yaitu sistem yang dapat mengolah data-data dan menghasilkan informasi secara tepat, jelas, dan terstruktur. Sistem informasi pemerintahan daerah yang dirancang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel (Sulaeman et al., 2022), sehingga setiap pekerjaan akan dapat direalisasikan secara lebih efisien dan efektif (Ambara & Antarajaya, 2023).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berbasis web digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait pelaporan keuangan yang disusun secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing instansi pemerintah daerah yang mampu menangani, menghubungkan, dan

mempermudah proses konsolidasi data sehingga data di pemerintah daerah dapat terintegrasi dengan lancar, namun masalah yang terdapat bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sering terjadi ketidaksinkronan antara data yang diinput dengan hasil output akhir sehingga perlunya dilakukan pengecekan manual lagi oleh pembuat laporan keuangan. SIPD menjadi bagian e-government memiliki fungsi kritis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan pemerintahan yang responsif terhadap persoalan-persoalan daerah, peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah dan dapat mendorong transparansi dan keterbukaan publik di daerah (Sudianing & Seputra, 2019).

Sistem Pengendalian Internal adalah komponen selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Rahmawati et al., 2018). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kualitas informasi laporan keuangan tidak meningkat adalah kegagalan sistem pengendalian internal untuk berfungsi dengan baik. Untuk mencegah kemungkinan besar penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBD), auditor internal seharusnya melakukan review terus menerus sepanjang proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) bertanggung jawab untuk memberikan kepercayaan yang cukup untuk keberhasilan dan efisiensi proses akuntansi, terutama dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat diandalkan (Sondang & Bimo, 2020).

Dengan demikian, penerapan Sistem Pengendalian Internal dapat meningkatkan reliabilitas, objektivitas dan pencegahan inkonsistensi serta memudahkan proses audit laporan keuangan. Sistem Pengendalian Internal yang baik juga mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan atau perhitungan, yang mengurangi kemungkinan kekeliruan yang dialami pemerintah daerah. Hal ini didukung penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Alamsyah Rifky et al., 2017). Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian yang menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Cahyandari & Triyono, 2017).

Keterbatasan dalam penelitian yaitu menggunakan variabel, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal sehingga ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu pemanfaatan teknologi informasi, peran inspektorat daerah dan komitmen organisasi. metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, yang memungkinkan adanya respon yang bias dari para responden dalam menjawab pertanyaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi, kinerja keuangan dan arus kas entitas sehingga sebagian besar pengguna laporan keuangan dapat menggunakannya untuk membuat keputusan ekonomi. Pertanggungjawaban manajemen atas

penggunaan sumber daya yang diberikan juga ditunjukkan dalam laporan keuangan (Herawati, 2019). Oleh karena laporan keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, laporan tersebut harus dipresentasikan secara relevan, dapat diandalkan, dan harus disertai dengan pengungkapan yang memadai (*disclosure*) mengenai informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Laporan keuangan dibuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan yang ideal memenuhi syarat-syarat kualitatif dan dapat dipertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Publik akan menggunakan laporan ini sebagai pedoman untuk membuat kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Eriani et al., 2018).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang, organisasi (kelembagaan), atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia dibagi menjadi dua kategori. Sumber daya manusia mikro mencakup karyawan yang bekerja untuk pemerintahan atau organisasi yang lebih luas, sedangkan sumber daya manusia makro mencakup orang-orang yang telah mencapai usia produktif untuk menjadi karyawan atau pegawai. Orang-orang yang belum bekerja juga dianggap makro karena usia mereka sudah mencapai usia produktif sebagai pegawai atau karyawan (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Sumber daya manusia adalah aset yang dimiliki oleh pemerintahan atau perusahaan yang bekerja di sana. Jika dilatih dan dikembangkan dengan baik, mereka dapat membantu organisasi berkembang. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus berkompeten dengan memperhatikan aspek berikut: Pengetahuan adalah kemampuan yang kompleks yang diukur melalui tes pengetahuan. Pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik dan mental. Pengalaman adalah pelajaran yang dapat diambil untuk digunakan di masa depan. Tanggung Jawab adalah kesadaran manusia akan tindakan atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja (Rohida, 2018).

H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) adalah langkah nyata pemerintah yang membantu pemerintah daerah menjalankan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan (Siwambudi et al., 2017). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. Hal ini didukung oleh fakta bahwa laporan keuangan tersebut dibuat secara relevan, andal dan dapat dibandingkan (Aditya & Surjono, 2017).

H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODE

Desain penelitian menggunakan asosiatif kausal yang dikenal sebagai hubungan sebab akibat. Penelitian dilakukan bulan Juli sampai dengan bulan November 2022 pada 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi DKI Jakarta. Populasi sebagai wilayah umum yang terdiri dari obyek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, 42 SKPD di Provinsi DKI Jakarta digunakan sebagai populasi.

penelitian menggunakan sampel jenuh, yang berarti seluruh populasi diambil sebagai sampel penelitian yaitu bendahara pengeluaran pada 42 SKPD.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan bersumber data primer dan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data statistik deskriptif menampilkan nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata, standar deviasi, dan varians masing-masing variabel. kuesioner diuji keabsahan dan keandalannya terlebih dahulu sehingga menghasilkan data yang akurat. selanjutnya dilakukan uji validitas untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari penelitian benar-benar valid. Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi seberapa reliabel suatu kuesioner yang menunjukkan suatu konstruk atau variabel. Kuesioner dianggap reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Uji statistik *cronbach alpha* digunakan untuk mengevaluasi reliabilitas pengamatan; nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 dianggap sebagai konstruk atau variabel yang reliabel (Ghozali, 2013). Data untuk regresi harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu harus terdistribusi dengan normal, tidak mengandung autokorelasi, tidak terdapat multikolinieritas, serta tidak bersifat heteroskedastisitas. Jika model regresi telah memenuhi semua persyaratan tersebut, maka dapat dikatakan regresi tersebut adalah BLUE yang merupakan singkatan dari *Best Linear Unbiased Estimator* (estimator yang terbaik, linier, dan tidak bias). Uji hipotesis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. menggunakan uji koefisien determinasi (*Adjuster R²*), uji statistik F, uji statistik t dan persamaan regresi linear berganda.

PEMBAHASAN

Hasil deskriptif statistik dari penelitian dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.
Deskriptif Statistik Responden

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	42	3.42	5.00	4.2498	.45782
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	42	3.50	5.00	4.1919	.47373
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X ₂)	42	3.25	5.00	4.2960	.56032
Sistem Pengendalian Intern (X ₃)	42	2.40	5.00	3.8300	.55851
Valid N (listwise)	42				

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diketahui bahwa N=42 yang memiliki arti yaitu jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 42 sampel yang terdiri dari 42 bendahara pengeluaran pada SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan variabel dependen yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah, dan sistem pengendalian

intern. Penilaian statistik deskriptif didasarkan pada rentang penilaian 1-5, dimana 1 menunjukkan sangat rendah, 2 menunjukkan rendah, 3 menunjukkan sedang, 4 menunjukkan tinggi, dan 5 menunjukkan sangat tinggi.

Hasil penilaian responden atas variabel-variabel di atas dapat dilihat bahwa: Dari skala 1 (satu) sangat rendah dan 5 (lima) sangat tinggi dalam analisis deskriptif variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 4,2498 atau tinggi, berarti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat baik. Ini menunjukkan bahwa laporan tersebut memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan, material dan konservatif.

Kompetensi sumber daya manusia senilai rata-rata (*mean*) yaitu 4,1919 artinya responden mempersepsikan bahwa kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah tinggi. Kompetensi sumber daya manusia yang tinggi mengindikasikan bahwa sumber daya manusia yang ada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Pengetahuan pada bidang Akuntansi, telah mengikuti pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan badan pengembangan sumber daya manusia, serta memiliki keterampilan dan tanggung jawab pekerjaan dalam membuat laporan keuangan.

Sistem informasi pemerintah daerah senilai rata-rata (*mean*) yaitu 4,2960 artinya responden mempersepsikan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah tinggi. Sistem informasi pemerintah daerah yang tinggi mengindikasikan bahwa sistem informasi pemerintah daerah telah memenuhi aspek sesuai dengan indikator yaitu sistem yang memiliki tingkat kecepatan dan kemudahan dalam hal penyelesaian pekerjaan membuat laporan keuangan, memastikan waktu yang tepat dan hasil yang sesuai dengan harapan, dan memberikan informasi yang membantu dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas.

Sistem pengendalian senilai rata-rata (*mean*) yaitu 3,8300 artinya responden mempersepsikan bahwa sistem pengendalian intern pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sedang. Sistem pengendalian intern yang sedang mengindikasikan bahwa kegiatan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan untuk mendukung berjalannya sistem pengendalian intern yang ada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum berjalan secara maksimal.

Tabel 2.
Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Indikator	Pertanyaan	R Hitung	Cronbach Alpha
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Relevan	KLK1	0.789	0,940
		KLK2	0.641	
		KLK3	0.577	
		KLK4	0.580	
		KLK5	0.727	
	Andal	KLK6	0.778	

			KLK7	0.575			
			KLK8	0.720			
			KLK9	0.748			
			KLK10	0.761			
		Dapat Dibandingkan	KLK11	0.801			
			KLK12	0.799			
			KLK13	0.671			
		Dapat Dipahami	KLK14	0.793			
			KLK15	0.737			
		Materialitas	KLK16	0.657			
			KLK17	0.709			
		Konservatisme	KLK18	0.640			
			KLK19	0.617			
		Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	Pengetahuan	KSDM1		0.539	0,914
				KSDM2		0.653	
				KSDM3		0.762	
				KSDM4		0.742	
			Pelatihan	KSDM5		0.639	
				KSDM6		0.544	
KSDM7	0.811						
Keterampilan	KSDM8		0.772				
	KSDM9		0.769				
Pengalaman	KSDM10		0.844				
	KSDM11		0.732				
Tanggung Jawab	KSDM12		0.658				
	KSDM13		0.692				
	KSDM14		0.594				
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X ₂)	Tingkat Kecepatan	SIPD1	0.784	0,925			
		SIPD2	0.867				
	Efisiensi Waktu	SIPD3	0.892				
		SIPD4	0.723				
	Kualitas Hasil	SIPD5	0.873				
		SIPD6	0.873				
	Kemudahan & Manfaat	SIPD7	0.786				
		SIPD8	0.720				
Sistem Pengendalian Intern (X ₃)	Lingkungan Pengendalian	SPI1	0.671	0,941			
		SPI2	0.750				
		SPI3	0.771				
		SPI4	0.662				
		SPI5	0.673				

	Penilaian Resiko	SPI6	0.687
		SPI7	0.817
	Kegiatan Pengendalian	SPI8	0.810
		SPI9	0.794
		SPI10	0.735
	Informasi & Komunikasi	SPI11	0.818
		SPI12	0.808
		SPI13	0.754
	Pemantauan Pengendalian Intern	SPI14	0.656
		SPI15	0.758

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel hasil uji validitas didapatkan semua data $>0,05$, sehingga semua pertanyaan dalam survei dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan untuk digunakan sebagai instrument kuesioner. Hasil uji reliabilitas data menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki angka *Cronbach Alpha* yang $>0,600$, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat penelitian yang digunakan untuk mengukur keempat variabel dalam penelitian dapat dianggap handal atau reliabel.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal. Ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas residual dari variabel independen dan variabel dependen penelitian. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka populasi data berdistribusi normal.

Tabel 3.

Uji Normalitas

Variable	Tolerance	VIF
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)	.714	1.40
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X_2)	.688	1.45
Sistem Pengendalian Intern (X_3)	.954	1.04
Kolmogorov-Smirnov Test (Sign.)	.200	9

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel normalitas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,087 dan signifikansi adalah 0,200 atau nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal. nilai toleransi masing-masing variabel independen mendekati 1, dan nilai VIF masing-masing variabel independent juga tidak lebih

dari 10. Ini menunjukkan bahwa model regresi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami multikolonieritas antar variabel independen.

Tabel 4.

Hasil Uji Auto Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.831 ^a	.691	.667	5.02647	1.839

Sumber: Data diolah (2023)

Hasil uji auto korelasi menunjukkan bahwa nilai durbin-watson sebesar 1.839, yang akan dibandingkan dengan nilai durbin-watson pada tingkat signifikan 5%. Nilai durbin-watson ini lebih besar dari batas atas (du) yaitu 1.6617 dan lebih rendah dari ($4-du$) ($4-1.6617$) = 2,3383, atau dapat digambarkan sebagai berikut: $du < dw < 4-du = 1.6617 < 1.839 < 2.3383$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi penelitian ini.

Uji simultan (Uji-F) dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05 akan digunakan untuk menguji hipotesis. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka hipotesis dianggap diterima. Ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen serta sebaliknya.

Tabel 5.

Hasil Uji-F

Model		Sum of Squares	df	Mean SquareF	Sig.	
1	Regression	2148.033	3	716.011	28.340	.000 ^b
	Residual	960.086	38	25.265		
	Total	3108.119	41			

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 28,340 dan nilai F_{tabel} sebesar 2.85. Nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} yang berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak. Ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern secara bersamaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, berdasarkan tingkat signifikansi, nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 atau dibawah 5%. Kesimpulannya secara simultan variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji Parsial (Uji t) dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05 akan digunakan untuk menguji hipotesis. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka hipotesis dianggap diterima. Ini

menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen serta sebaliknya.

Tabel 6.
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients	Coefficients	Beta		
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2.307	8.628		.267	.791
Kompetensi Sumber					
Daya Manusia (X ₁)	.655	.140	.498	4.670	.000
Sistem Informasi					
Pemerintah Daerah (X ₂)	.605	.211	.312	2.867	.007
Sistem Pengendalian Intern (X ₃)					
	.334	.096	.321	3.479	.001

Sumber: Data diolah (2023)

Ketiga variabel independen dalam regresi, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel kompetensi sumber daya manusia menghasilkan nilai koefisien parameter 0,655 dengan tingkat signifikansi $(0,000) < 0,05$, dan variabel sistem informasi pemerintah daerah menghasilkan nilai koefisien parameter 0,605 dengan tingkat signifikansi $(0,007) < 0,05$ serta variabel sistem pengendalian intern menghasilkan nilai koefisien parameter 0,334 dengan tingkat signifikansi $(0,001) < 0,05$.

Uji koefisien determinasi adalah ukuran seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R² harus berkisar antara 0 dan 1, yang berarti bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya, nilai R² yang besar menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar.

Tabel 7.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.831 ^a	.691	.667	5.02647

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R adalah 0,831, yang menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat (lebih dari 0,5) antara variabel y (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah) dan tiga variabel independennya. Namun karena jumlah variabel independen lebih dari dua, nilai *R Square* yang disesuaikan adalah 0,667. Angka tersebut menunjukkan pengaruh besar pengaruh variabel X₁ hingga X₃ terhadap variabel Y (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah) sebesar 66,7% secara

gabungan. sedangkan sisanya 33,3% dipengaruhi oleh faktor eksternal lain di luar penelitian ini seperti pemahaman teknologi informasi.

Tabel 8.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	2.307	8.628		.267	.791
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	.655	.140	.498	4.670	.000
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X ₂)	.605	.211	.312	2.867	.007
Sistem Pengendalian Intern (X ₃)	.334	.096	.321	3.479	.001

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil regresi, koefisien konstanta sebesar 2,307 menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bernilai 2.307 jika variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern dianggap konstan. Koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,655 dari persamaan regresi menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 65,5 % jika variabel kompetensi sumber daya manusia meningkat sebesar 100% dan variabel sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern dianggap konstan. Koefisien sistem informasi pemerintah daerah dari persamaan regresi adalah 0,605, yang berarti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 60,5% jika variabel sistem informasi pemerintah daerah meningkat sebesar 100% sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern dianggap konstan. Koefisien sistem pengendalian intern sebesar 0,334 dari persamaan regresi menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 33,4% jika variabel sistem pengendalian intern meningkat sebesar 100% sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi pemerintah daerah tetap sama demikian juga sebaliknya.

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat diketahui pada hasil uji-f dimana nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < \alpha = 0,05$). Hal ini sangat wajar jika keseluruhan variabel tersebut mampu berpengaruh secara simultan dikarenakan semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah

daerah yang baik, dan diterapkannya sistem pengendalian intern yang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada organisasi Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan kesuksesan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan (Rizka S et al., 2021). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang membuktikan bahwa penerapan sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Mahruzia, 2021).

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh nilai signifikan maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Dalam laporan keuangan, jelas bahwa kompetensi sumber daya manusia yang berkompeten sangat dibutuhkan di instansi. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah para pegawai di satuan perangkat daerah atau di badan keuangan daerah yang memiliki kewajiban untuk melakukan atau menyusun laporan keuangan. Sumber daya manusia yang kompeten sangat dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas karena laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi (Intan Diane Binangkit, Linda Hetri Suryanti, 2020). Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, akuntansi keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Rosmalita & Nadirsyah, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Cahyandari & Triyono, 2017). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang membuktikan bahwa Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Sanjaya, 2017).

Pengaruh sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh nilai signifikan maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi pemerintah daerah (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Sistem informasi pemerintah daerah menjadi *bagian e-government* yang memiliki fungsi kritis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan pemerintahan yang responsif terhadap persoalan-persoalan daerah, peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah serta dapat mendorong transparansi dan keterbukaan publik di daerah (Sudianing & Seputra, 2019). Hal ini didukung dengan adanya sistem informasi pemerintah daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sistem ini dirancang untuk menjadi lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel dan memiliki kecepatan, efisiensi waktu, kualitas hasil yang tinggi, memiliki

fitur-fitur yg mampu memberikan efektifitas juga efisien kinerja pengolahan dan penyimpanan (Pratama et al., 2023). Ini memberikan kemudahan untuk menyajikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa penerapan sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Cahyandari & Triyono, 2017).

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh nilai signifikan maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal (X_3) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Semakin baik sistem pengendalian internal maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat karena sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan seberapa baik kualitas laporan keuangan khususnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada organisasi Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut didukung dengan adanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan atau monitoring secara rutin yang dilakukan oleh pimpinan maupun pegawai pada setiap SKPD sehingga dapat mewujudkan sistem pengendalian intern yang baik, semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula dan risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisir (Suratman et al., 2022).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Alamsyah Rifky et al., 2017). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang menunjukkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Cahyandari & Triyono, 2017).

KESIMPULAN

Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial dari sistem informasi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial dari sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Influence Of Internal Control System On Quality Of Regional Financial Reporting. *Journal SIKAP (Information Systems, Finance, Auditing And Taxation)*, 2(1), 49–62. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i1.3.66>

- Alamsyah Rifky, Rahayu Sri, & Muslih Muhamad. (2017). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Emperis pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(2), 201–210.
- Ambara, M. P., & Antarajaya, I. N. S. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Akademik Untuk Mendukung Proses Perkuliahan Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Teknologi Informasi & Komputer*, 9(3), 291–297.
- Armel, R. Y. G., Nasir, A., & Safitri, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 105–119.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Cahyandari, D. A., & Triyono. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Eriani, V., Zamzami, & Arum, E. D. P. (2018). Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 3(6), 1–13.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawati, H. (2019). Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *Akuntansi Unihaz - JAZ*, 2(1), 16–25.
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Literature Review. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>
- Intan Diane Binangkit, Linda Hetri Suryanti, A. M. P. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Valuta*, 6(1), 41–54. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1145%0Ahttp://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/download/1145/690>
- Iqbal, M. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 5(1), 747–764. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/view/17595>
- Mahruzia, H. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. UPN Veteran Jatim.
- PERKA NO 7 Tahun 2013. (2013). Kamus Kompetensi BKN. *Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, PERKA NO 7, 2*.
- Pratama, D., Nurani, D., Putra, A. D., & Nur'aini. (2023). Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Pada SMA Negeri 1 Semende Darat Ulu. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9(3). <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jutik/article/view/2502>
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 8–17.
- Ramadhani, M., Soerono, A. N., & Mulyasari, W. (2019). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Dan Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 40–63. <https://doi.org/10.35448/JRAT.V12I1.5244>
- Rizka S, A., Zamzami, Z., & Gowon, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(3), 136–148. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i3.16111>
- Rohida, L. (2018). Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 6(1), 114–136.
- Rosmalita, N., & Nadirsyah, N. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 239–248. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15559>
- Sanjaya, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderas. *JOM Fekom*, 4(1), 366–380.
- Siwambudi, I. G. N., Yasa, G. W., & Badera, I. D. N. (2017). Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1, 385–416.
- Sondang, Y., & Bimo, I. D. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Prosiding Working Papers Series In Management*, 174–184.
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 1–22.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Alfabeta).
- Sulaeman, M. M., Ruswaji, R., & Cahyono, P. (2022). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Anggota Pengguna Jasa Koperasi Simpan Pinjam Artha Niaga Sentosa Surabaya. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 892–895. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1572>
- Suratman, A., Hendri, & Muhammad, S. (2022). JRAA Vol. 9 No. 1 Maret 2022 Analisis Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi, Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BASARNAS. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(1), 57–76. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i1.440>
- Suryatimur, K. P., Khotijah, S. A., & Prasetyanto, P. K. (2020). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan pada BUMDes Desa Balesari. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 4(2), 242–246. <https://doi.org/10.37859/JPUMRI.V4I2.2163>